

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai indikator parameter yang digunakan dalam mengevaluasi kondisi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas perdagangan internasional. Kondisi ini mendorong persaingan antar negara untuk memanfaatkan kebebasan ekonomi global, sehingga setiap negara membuka diri terhadap perdagangan secara global.

Kegiatan perdagangan internasional mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa antara berbagai negara, yang menyertakan konversi mata uang dan melintasi perbatasan. Tujuan utama negara-negara dalam melakukan transaksi ekonomi internasional adalah untuk memenuhi kebutuhan domestik dan memanfaatkan sumber daya secara optimal (Tiara et al., 2023). Salah satu indikator yang dapat meningkatkan PDB sebuah negara adalah melalui perdagangan internasional. Pendapatan nasional suatu negara akan meningkat dan memberikan dampak signifikan pada perkembangan ekonomi jika kegiatan ekspor melebihi impor (Yuni, 2021). Jika suatu negara memiliki kegiatan ekspor yang lebih besar, jumlah cadangan devisa akan meningkat, sedangkan jika lebih banyak kegiatan impor maka jumlah cadangan devisa akan menurun (Asyaria et al., 2020).

Dalam perdagangan internasional, komoditas ekspor dibagi dalam 2 kategori, yakni migas dan nonmigas (Silaban, 2022). Di Indonesia komoditas ekspor yang paling banyak dilakukan untuk menopang perekonomian dalam sektor ekspor komoditas barang non migas yang diandalkan yaitu pada bidang ekspor hasil bumi, seperti kelapa sawit, karet, produk tekstil, otomotif, dan elektronik (Sabowo et al., 2023).

Kelapa sawit adalah komoditas pertanian yang menghasilkan CPO dan merupakan produk ekspor utama Indonesia. Prospek perkembangan produksi kelapa sawit menunjukkan potensi yang sangat signifikan, karena terjadinya pertumbuhan jumlah produk yang diproduksi bertambah seiring peningkatan minat beli konsumen (Yulianto, 2019).

CPO memiliki peran besar untuk perkembangan perekonomian di Indonesia. Pertama, industri CPO, yang merupakan sektor padat karya dari hulu hingga hilir, Industri ini memberikan pekerjaan langsung kepada 4,2 JT orang dan pekerjaan tidak langsung kepada 12 JT orang Kedua, setiap tahunnya CPO memberikan kontribusi untuk PDB sebesar 3,5%. Ketiga, kontribusi untuk ekspor non migas sebesar nasional dengan rata-rata sebesar 13,5% per tahun dan proyeksi untuk pendapatan nasional sebesar Rp 2,47 triliun. Keempat, swasembada energi dapat direalisasikan melalui program wajib biodiesel, sehingga dapat menghemat devisa negara dan juga dapat mengurangi emisi karbon, serta mengurangi impor solar sebesar US \$8.0 miliar per tahun (GAPKI, 2021).

Terdapat 160 jenis produk hilir yang dapat dihasilkan dari pengolahan minyak sawit di dalam negeri, termasuk bahan kimia (oleokimia), fitofarmaka, pangan, dan bahan bakar terbarukan (biodiesel). Proyeksi nilai ekonomi sektor industri CPO, baik dari hulu maupun hilir, mencapai Rp 750 triliun per tahun, dan yang disumbangkan untuk devisa ekspor sebesar Rp 300 triliun (Kemenperin, 2021).

Tabel 1.1 Daftar Negara Tujuan Ekspor CPO Indonesia dalam Ton

Importir	2019	2020	2021	2022
	Kuantitas Ekspor	Kuantitas Ekspor	Kuantitas Ekspor	Kuantitas Ekspor
World	7,401,796	7,170,956	2,543,057	3,462,817
India	3,987,951	4,390,669	1,923,858	2,883,818
Italy	206,554	347,723	90,056	145,163
Malaysia	823,061	374,365	43,738	101,126
Netherlands	462,259	257,695	83,300	81,665
Kenya	103,710	333,674	182,241	88,397
Spain	821,718	769,788	79,156	68,079
Germany	78,806	80,994	58,110	6,000
Morocco	10,999	6,025	2,850	7,499
Singapore	527,471	313,501		5,000
Mozambique	5,849	5,499		6,499

Sumber: UN Comtrade statistics

Pada tabel 1.1 Data terlihat bahwa tujuan ekspor CPO Indonesia mencakup wilayah yang tidak hanya terbatas pada Asia, tetapi juga meluas

ke luar Asia. Sepuluh negara utama tujuan ekspor CPO Indonesia meliputi India, Italia, Malaysia, Belanda, Kenya, Jerman, Maroko, Singapura, dan Mozambik. Namun, pasar ekspor CPO Indonesia secara global terjadi penurunan tahunan; 2019, kuantitas ekspor tercatat sebesar 7.407.796 ton, terjadi penurunan di tahun 2018 menjadi 7.170.956 ton, lalu penurunan yang signifikan di tahun 2021 yaitu sebesar 2.543.057 ton, dan naik kembali di tahun 2022 sebesar 3.462.817 ton.

Berdasarkan data di atas perkembangan dan perubahan ekspor CPO dapat terjadi karena perubahan eksternal, seperti harga internasional dan kurs. Perubahan dalam struktur harga pasar internasional untuk CPO dapat berpotensi memengaruhi permintaan domestik terhadap komoditas tersebut. Lebih lanjut, fluktuasi harga internasional CPO memiliki kemungkinan untuk memengaruhi produksi dan ekspor CPO Indonesia, yang pada akhirnya akan berdampak yang signifikan bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh (Wahyuni, 2021). Berikut adalah tabel yang menunjukkan fluktuasi harga.

Tabel 1.2 Harga CPO Internasional (USD) tahun 1992-2022

Tahun	Harga CPO Global (USD)	Tahun	Harga CPO Global (USD)
1992	394	2008	1043
1993	378	2009	741
1994	528	2010	933
1995	628	2011	1193
1996	531	2012	1043
1997	546	2013	871

Tahun	Harga CPO Global (USD)	Tahun	Harga CPO Global (USD)
1998	671	2014	837
1999	436	2015	663
2000	310	2016	736
2001	287	2017	751
2002	411	2018	639
2003	477	2019	601
2004	499	2020	752
2005	451	2021	1131
2006	508	2022	1276
2007	817		

Sumber: World Bank, Data di olah 2024

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, Harga CPO seringkali mengalami fluktuasi dengan perubahan yang cukup pesat. Berdasarkan teori *ceteris paribus*, "jika harga barang atau jasa naik, jumlah minat beli konsumen menurun, dan jika harga barang atau jasa turun, minat beli konsumen akan meningkat." Namun, perubahan harga CPO juga dipengaruhi oleh volume ekspor CPO Indonesia ke pasar global.

Namun, dalam data di atas, harga CPO tidak dapat diprediksi, dan belum tentu sesuai dengan asumsi *ceteris paribus*, jika harga CPO naik maka permintaan CPO menurun, begitu pun sebaliknya. Ketidakstabilan harga minyak goreng dalam periode waktu yang relatif singkat merupakan fenomena yang sering diamati. Salah satu faktor yang berkontribusi signifikan terhadap fluktuasi ini adalah kebijakan pelarangan ekspor. Kebijakan tersebut memiliki dampak yang substansial terhadap ketidakstabilan harga CPO dan minyak goreng. Dengan membatasi ekspor,

pasokan di pasar internasional berkurang, yang dapat menyebabkan lonjakan harga secara tiba-tiba. Sebaliknya, pelanggaran kebijakan ekspor dapat meningkatkan pasokan dan menekan harga. Oleh karena itu, kebijakan pelarangan ekspor memainkan peran penting dalam menciptakan ketidakstabilan harga komoditas ini. Salah satu faktor penting yang berperan adalah kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) yang diterapkan oleh Indonesia sebagai produsen utama CPO.

Setelah terjadi kenaikan harga minyak goreng yang terjadi baru-baru ini, pemerintah menerapkan kebijakan DMO 20% untuk CPO (Crude Palm Oil). Kebijakan ini merupakan inisiatif baru, karena DMO sebelumnya hanya diterapkan pada komoditas pertambangan antara lain, gas alam, emas, batu bara, nikel, minyak bumi dan barang tambang lainnya. Meskipun kebijakan tersebut bisa menyebabkan menurunkan posisi Indonesia yang menjadi eksportir utama CPO dan berisiko kalah bersaing dengan Malaysia, dampak positif dari kebijakan ini dianggap lebih signifikan dibandingkan dengan risiko kerusakan sosial yang dapat muncul akibat kenaikan harga *cooking oil* (Mustafa, 2022). DMO mengharuskan produsen untuk menyisihkan sebagian produksi untuk pasar domestik sebelum mengekspor sisanya. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga di pasar domestik (Arianti, 2023).

Perubahan harga yang terjadi di tiap tahunnya menjadi Indikator dan faktor pertimbangan dalam kegiatan ekspor melibatkan sejumlah aspek. Selain itu, fluktuasi kurs berdampak pada perubahan harga yang dapat

mengalami kenaikan atau penurunan. Oleh karena itu, kurs sering kali dimanfaatkan untuk memperkuat atau merangsang aktivitas ekspor. Perubahan dalam volume ekspor ini dapat berkontribusi untuk memperbaiki neraca perdagangan suatu negara. Ketika kurs suatu negara menguat, dapat mendorong peningkatan ekspor karena dapat meningkatkan pendapatan. Namun, jika kurs negara tersebut melemah, itu dapat mengakibatkan penurunan harga dan ekspor. Dengan demikian, perubahan dalam kurs memiliki hubungan yang erat dengan permintaan ekspor (Wahyuni, Mustafa, 2021). Berikut adalah tabel kurs IDR/USD untuk periode tahun 1992 hingga 2022.

Tabel 1.3 Kurs IDR/USD Tahun 1992-2022

Tahun	Kurs IDR/USD	Tahun	Kurs IDR/USD
1992	Rp 2.030	2008	Rp 9.699
1993	Rp 2.087	2009	Rp 10.390
1994	Rp 2.161	2010	Rp 9.090
1995	Rp 2.249	2011	Rp 8.770
1996	Rp 2.342	2012	Rp 9.387
1997	Rp 2.909	2013	Rp 10.461
1998	Rp 10.014	2014	Rp 11.865
1999	Rp 7.855	2015	Rp 13.389
2000	Rp 8.422	2016	Rp 13.308
2001	Rp 10.261	2017	Rp 13.381
2002	Rp 9.311	2018	Rp 14.237
2003	Rp 8.577	2019	Rp 14.148
2004	Rp 8.939	2020	Rp 14.582
2005	Rp 9.705	2021	Rp 14.308
2006	Rp 9.159	2022	Rp 14.850
2007	Rp 9.141		

Sumber: World Bank, 2024

Berdasarkan tabel 1.3, menunjukkan pada tahun 1992 sampai 1997 terjadi pergerakan kurs rupiah terhadap USD terlihat cukup stabil dan meningkat secara perlahan. Hal tersebut terjadi karena pada periode tersebut pemerintah menerapkan kebijakan kurs, dimana nilai mata uang asing di tetapkan oleh pemerintah dalam negeri. Kemudian di tahun berikutnya 1998 sampai 2022 pergerakan kurs mengalami fluktuasi. Hal tersebut terjadi karena pemerintah melakukan perubahan kebijakan kurs bebas mengambang. sepenuhnya bergantung pada mekanisme *supply and demand* di pasar (D. S. Lubis, 2018). Fluktuasi ini menimbulkan masalah dan ketidakpastian dalam kegiatan ekspor. Dengan adanya lonjakan permintaan yang signifikan terhadap minyak kelapa sawit mentah (CPO), Indonesia, sebagai penghasil utama CPO, memiliki kapasitas yang cukup. Peningkatan permintaan ini memungkinkan Indonesia untuk bersaing secara efektif di pasar internasional.

Menurut Sadono (2013), faktor lain yang menyebabkan terjadinya perubahan kurs mata uang adalah inflasi. Inflasi memiliki keterkaitan yang signifikan dengan kurs mata uang. Fluktuasi tingkat inflasi dapat memengaruhi kebutuhan terhadap mata uang suatu negara dan pada akhirnya berdampak pada pola perdagangan global. Berikut ini merupakan tabel perkembangan inflasi Indonesia tahun 1992-2022.

Tabel 1 4 Perkembangan Inflasi di Indonesia tahun 1992-2022

Tahun	Inflasi (%)	Tahun	Inflasi (%)
1992	4.94	2008	11.06
1993	9.77	2009	2.78
1994	9.24	2010	6.96
1995	8.64	2011	3.79
1996	6.47	2012	4.30
1997	11.05	2013	8.38
1998	77.63	2014	8.36
1999	2.01	2015	3.35
2000	9.35	2016	3.02
2001	12.55	2017	3.61
2002	10.03	2018	3.13
2003	5.06	2019	2.72
2004	6.40	2020	1.68
2005	17.11	2021	1.87
2006	6.60	2022	5.51
2007	6.59		

Sumber: Bank Indonesia (2024)

Berdasarkan tabel 1.4 menunjukkan Inflasi di Indonesia cenderung berfluktuasi, dengan salah satu periode yang mencatat tingkat inflasi signifikan terjadi pada tahun 1998. Penguatan drastis dolar AS karena pemulihan ekonomi di Amerika Serikat telah menyebabkan inflasi meningkat di Indonesia. Hal ini mendorong penarikan investasi portofolio dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, kembali ke negara asal investor. Meskipun demikian, Indonesia tetap menunjukkan stabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara seperti Eropa, Jepang, Malaysia, dan Singapura. Dampak yang dirasakan oleh Indonesia tidak seburuk dampak yang dialami oleh negara-negara lain, karena

perekonomian Indonesia kurang bergantung pada sektor keuangan Amerika Serikat dan memiliki tingkat inflasi yang lebih terkendali (Lubis, 2023). Inflasi dapat memengaruhi volume ekspor CPO Indonesia. Berikut ini tabel volume ekspor *Crude Palm Oil* Indonesia tahun 1992-2022.

Tabel 1.5 Perkembangan Volume Ekspor *Crude Palm Oil* Indonesia

Tahun 1992-2022

Tahun	Ekspor CPO (Ton)	Tahun	Ekspor CPO (Ton)
1992	970.629	2008	7.904.179
1993	1.221.803	2009	9.566.746
1994	1.306.615	2010	9.444.170
1995	1.004.403	2011	8.424.037
1996	986.362	2012	7.252.519
1997	1.448.362	2013	6.584.732
1998	403.843	2014	5.726.820
1999	865.426	2015	7.788.550
2000	1.817.664	2016	5.283.953
2001	1.849.142	2017	7.076.063
2002	2.804.792	2018	6.554.497
2003	2.892.130	2019	7.401.795
2004	3.819.927	2020	7.169.594
2005	4.565.625	2021	2.498.058
2006	5.199.287	2022	3.462.818
2007	5.701.286		

Sumber: UN Comtrade (2024)

Berdasarkan tabel 1.5 di atas, Hal ini mengindikasikan bahwa volume ekspor CPO Indonesia berfluktuasi setiap periode. Volume ekspor CPO mencapai puncaknya saat 2009 dengan 9.566.746 ton, sementara titik terendah terjadi pada tahun 1998 dengan hanya 403.843 ton. Penurunan

volume ekspor *Palm Oil* Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk penurunan harga tengah minyak sawit global. Penurunan ini disebabkan oleh kelimpahan Persediaan minyak nabati, yang mencakup minyak sawit dari Indonesia, serta penurunan pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang menjadi pasar utama bagi produk-produk ekspor.

Dalam upaya mengatasi fluktuasi ini dan meningkatkan daya saing di pasar global, Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan promosi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui berbagai strategi, termasuk memperkuat kerja sama CPOPC dan negara-negara ASEAN (Saragih & Rahayu, 2022). Upaya ini terkait erat dengan konsep keunggulan relatif. Keunggulan komparatif merupakan konsep ekonomi yang menjelaskan negara mendapatkan keuntungan dari perdagangan jika mereka menjual produk yang dapat mereka produksi dengan harga rendah daripada negara lain, serta membeli barang yang lebih mahal untuk dihasilkan di dalam negeri. Indonesia menjadi produsen minyak sawit utama secara global, yang mempunyai keunggulan relatif dalam produksi CPO.

Jika dilihat dari teori keunggulan komparatif, Titik berat keunggulan komparatif lebih besar di sisi penawaran, dimana hal ini mempengaruhi ekonomi, dan terjadinya gesekan perdagangan internasional karena faktor geografi, institusi, transformasi, dll (Seitz et al., 2009). Dan Indonesia memiliki keunggulan komparatif karena memiliki industri minyak sawit yang baik, sehingga menjadi ekspor minyak sawit utama di pasar global.

Berdasarkan penjelasan di atas, CPO merupakan komoditas unggulan Indonesia. Maka dari itu penulis akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor CPO Indonesia di pasar global tahun 1992–2022. Penulis akan menyajikan penelitian ini dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI EKSPOR *CRUDE PALM OIL* (CPO) INDONESIA DI PASAR GLOBAL TAHUN 1992 – 2022”

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah kurs berpengaruh terhadap volume ekspor CPO Indonesia di pasar global tahun 1992-2022?
- b. Apakah harga CPO internasional berpengaruh terhadap volume ekspor CPO Indonesia di pasar global tahun 1992-2022?
- c. Apakah inflasi berpengaruh terhadap volume ekspor CPO Indonesia di pasar global tahun 1992-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis seberapa besar pengaruh kurs terhadap ekspor CPO Indonesia di pasar global tahun 1992-2022
- b. Menganalisis seberapa besar pengaruh harga CPO internasional terhadap ekspor CPO Indonesia di pasar global tahun 1992-2022

- c. Menganalisis seberapa besar pengaruh inflasi terhadap ekspor CPO Indonesia di pasar global tahun 1992-2022

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan berbagai kebermanfaatan bagi pihak yang memiliki kepentingan, meliputi:

1. Manfaat Bagi Penulis
 - a. Memenuhi syarat sebagai karya akhir.
 - b. Meningkatkan pemahaman terhadap dinamika perekonomian Indonesia, terutama dalam konteks perdagangan internasional.
 - c. Mengetahui variabel-variabel yang berkontribusi terhadap ekspor CPO Indonesia di pasar global.
2. Manfaat Bagi Akademisi
 - a. Menambah wawasan ilmiah, khususnya dalam bidang perdagangan internasional.
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran terkait variabel-variabel yang memengaruhi ekspor CPO Indonesia di pasar global
3. Manfaat Bagi Institusi Pemerintah
 - a. Memberikan kontribusi dan perspektif positif untuk pengambilan keputusan terkait persetujuan, formulasi, dan implementasi kebijakan yang mendukung kegiatan perdagangan internasional.